

Penguatan Kapasitas Digital Lembaga Burangir melalui Website Edukasi dan Advokasi

*Strengthening the Digital Capacity of Burangir Institution through Educational and
Advocacy Website*

Danny Sihombing¹, Parulian*², Baringin Sianipar³

¹²³Informatika, Universitas HKBP Nommensen

¹danny@uhn.ac.id, ²liansirait@uhn.ac.id, ³baringin.sianipar@baringin.ac.id

Dikirim: 09-06-2026|Direvisi: 13-06-2026|Diterima: 14-06-2026|Tersedia Online: 20-06-2026

Abstrak

Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan Burangir menghadapi kendala dalam penyediaan media digital resmi yang mampu menyajikan profil lembaga, program, informasi edukatif, advokasi, dokumentasi kegiatan, kanal relawan, donasi, dan kontak layanan secara terpadu. Kondisi ini menyebabkan akses masyarakat terhadap informasi perlindungan anak dan perempuan belum optimal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas digital Lembaga Burangir melalui pengembangan website edukasi dan advokasi berbasis komunitas. Metode kegiatan dilakukan melalui enam tahapan, yaitu identifikasi kebutuhan mitra, pengumpulan data kelembagaan, perancangan struktur konten, pengembangan website, validasi bersama mitra, dan pendampingan pengelolaan konten. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa telah tersedia satu website lembaga yang aktif dan representatif dengan sebelas fitur utama, yaitu beranda, tentang kami, program, isu prioritas, agenda kegiatan, berita dan edukasi, FAQ, testimoni, relawan, donasi, dan kontak. Secara kualitatif, kegiatan ini meningkatkan kapasitas digital mitra dari kondisi belum terintegrasi menjadi lebih terstruktur, informatif, dan mudah diakses. Kontribusi pengabdian ini adalah tersedianya media digital terpadu yang mendukung visibilitas lembaga, edukasi publik, advokasi sosial, akses awal informasi layanan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak dan perempuan.

Kata kunci: kapasitas digital; website; advokasi; perlindungan anak; pengabdian masyarakat

Abstract

Burangir Child and Women Protection Institution faced challenges in providing an official digital platform that could integrate institutional profiles, programs, educational information, advocacy content, activity documentation, volunteer channels, donation access, and service contacts. This condition limited public access to information related to child and women protection. This community service activity aimed to strengthen the digital capacity of Burangir Institution through the development of a community-based educational and advocacy website. The method consisted of six stages: identifying partner needs, collecting institutional data, designing content structure, developing the website, conducting partner validation, and assisting content management. The results show that one active and representative institutional website has been developed with eleven main features, namely homepage, about us, programs, priority issues, activity agenda, news and education, FAQ, testimonials, volunteers, donations, and contact. Qualitatively, this activity improved the partner's digital capacity from an unintegrated condition to a more structured, informative, and accessible digital communication system. The

contribution of this program is the availability of an integrated digital platform that supports institutional visibility, public education, social advocacy, initial access to service information, and community participation in child and women protection.

Keywords: *digital capacity; website; advocacy; child protection; community service*

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi kebutuhan strategis bagi organisasi sosial dalam memperkuat komunikasi, memperluas jangkauan layanan, membangun kepercayaan publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Transformasi digital tidak hanya dipahami sebagai penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga sebagai perubahan proses, strategi, dan pola interaksi organisasi dengan pemangku kepentingan (Verhoef et al., 2021; Vial, 2019). Dalam konteks organisasi publik dan organisasi sosial, digitalisasi mampu meningkatkan efektivitas penyampaian informasi, mempercepat respons layanan, serta memperluas akses masyarakat terhadap program yang disediakan oleh lembaga (Mergel et al., 2019). Oleh karena itu, organisasi nirlaba dan lembaga swadaya masyarakat perlu memiliki kapasitas digital yang memadai agar mampu menjalankan fungsi edukasi, advokasi, publikasi, dan pelayanan sosial secara lebih efektif.

Organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi bisnis karena orientasi utamanya bukan pada keuntungan, melainkan pada dampak sosial dan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Cipriano menjelaskan bahwa transformasi digital pada organisasi nirlaba perlu diarahkan untuk memperkuat misi sosial, efektivitas organisasi, dan relasi dengan komunitas sasaran (Cipriano & Za, 2025). Media digital dapat menjadi sarana penting bagi organisasi sosial untuk membangun komunikasi publik, memperkuat advokasi, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat terhadap isu yang diperjuangkan (Guo & Saxton, 2018). Selain itu, pemanfaatan kanal digital oleh organisasi nirlaba dapat mendukung penyebaran informasi, pembentukan komunitas, dan ajakan tindakan sosial yang lebih luas (Lovejoy & Saxton, 2012; Nah & Saxton, 2013).

Website merupakan salah satu media digital yang penting bagi organisasi sosial karena dapat berfungsi sebagai pusat informasi resmi yang lebih stabil, lengkap, dan mudah diakses. Berbeda dengan media sosial yang bersifat cepat dan dinamis, website dapat menyajikan profil lembaga, program, dokumentasi kegiatan, artikel edukatif, informasi layanan, kanal relawan, donasi, dan kontak secara lebih terstruktur. Moreno-Cabanillas menunjukkan bahwa website organisasi sosial berperan penting dalam memperkuat strategi komunikasi digital, interaktivitas, dan keterhubungan organisasi dengan publik (Moreno-Cabanillas et al., 2024). Keberadaan website juga dapat meningkatkan kredibilitas organisasi karena masyarakat dapat memperoleh informasi resmi secara langsung dari sumber utama lembaga (Waters et al., 2009). Dalam konteks dukungan publik, media digital juga berperan dalam membangun reputasi, kepercayaan, dan niat masyarakat untuk berpartisipasi atau memberikan dukungan kepada organisasi sosial (Obadă, 2024). Urgensi digitalisasi menjadi semakin penting bagi lembaga yang bergerak dalam isu perlindungan anak dan perempuan. Isu ini memiliki sensitivitas tinggi karena berkaitan dengan kelompok rentan, korban kekerasan, privasi, keamanan data, dan

kebutuhan akses informasi layanan yang aman. UNICEF Indonesia menunjukkan bahwa anak-anak dan keluarga menghadapi berbagai tantangan di ruang digital, termasuk risiko paparan konten tidak layak, perundungan, eksploitasi, dan keterbatasan literasi keamanan digital (Indonesia, 2023). UNICEF Innocenti juga menegaskan bahwa kehidupan anak-anak saat ini semakin terhubung dengan ruang digital sehingga perlindungan anak perlu mempertimbangkan aspek teknologi, literasi, dan keamanan informasi (Innocenti, 2025). Di sisi lain, United Nations menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak dan remaja (United Nations, 2024). Dengan demikian, lembaga perlindungan anak dan perempuan perlu hadir di ruang digital secara bertanggung jawab, informatif, dan berorientasi pada perlindungan.

Di Indonesia, perlindungan anak dan perempuan memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya (Republik Indonesia, 2014). Perlindungan terhadap perempuan dan korban kekerasan dalam rumah tangga juga diperkuat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 (Republik Indonesia, 2004). Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 mengatur perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Republik Indonesia, 2012). Ketiga regulasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak dan perempuan memerlukan dukungan kelembagaan, edukasi masyarakat, akses informasi, serta mekanisme pendampingan yang dapat dijangkau oleh publik.

Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan Burangir merupakan organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam isu perlindungan anak dan perempuan di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Berdasarkan dokumen kelembagaan, Burangir memiliki visi untuk mewujudkan tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang mampu melindungi dan memenuhi hak-hak anak dan perempuan. Misi lembaga mencakup peningkatan kesadaran semua pihak terhadap hak anak, mendorong implementasi pemenuhan hak anak dan perempuan, membela hak-hak anak dan perempuan, melakukan kajian dan advokasi kebijakan, serta menjadi bagian dari gerakan masyarakat sipil untuk keadilan dan kesetaraan. Prinsip lembaga meliputi perlindungan, keadilan, kesetaraan, demokratis, non-diskriminasi, dan penegakan hak anak serta perempuan. Secara kelembagaan, Burangir juga memiliki struktur organisasi yang mencakup badan pendiri, direktur eksekutif, sekretaris eksekutif, divisi sekretariat, divisi advokasi, dan relawan.

Meskipun telah memiliki dasar kelembagaan dan mandat sosial yang jelas, hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa Lembaga Burangir masih menghadapi kendala dalam penguatan media digital. Permasalahan utama yang ditemukan adalah belum tersedianya media digital resmi yang mampu menyajikan informasi kelembagaan secara terpadu. Informasi mengenai profil lembaga, program, kegiatan, edukasi, advokasi, kanal relawan, donasi, dan kontak layanan belum tersusun dalam satu media digital yang representatif dan mudah diakses publik. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan lembaga untuk memperluas edukasi dan advokasi dengan keterbatasan sarana digital yang tersedia. Kesenjangan tersebut dapat dilihat dari tiga aspek kebutuhan mitra. Pertama, dari aspek informasi kelembagaan, mitra membutuhkan media resmi yang dapat

menampilkan identitas, visi, misi, struktur, prinsip kerja, dan program lembaga secara sistematis. Kedua, dari aspek edukasi dan advokasi, mitra membutuhkan kanal digital yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang perlindungan anak, pendampingan perempuan, ruang aman, pencegahan kekerasan, dan penguatan komunitas. Ketiga, dari aspek partisipasi publik, mitra membutuhkan media yang dapat menyediakan akses kontak layanan, informasi relawan, dan dukungan donasi secara lebih terstruktur. Berdasarkan pemetaan kebutuhan awal, terdapat sebelas komponen informasi utama yang perlu difasilitasi dalam website, yaitu beranda, tentang kami, program, isu prioritas, agenda kegiatan, berita dan edukasi, FAQ, testimoni, relawan, donasi, dan kontak.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas digital Lembaga Burangir merupakan kebutuhan nyata yang selaras dengan mandat sosial lembaga. Kapasitas digital dalam kegiatan ini tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan lembaga untuk mengelola informasi, menyusun konten, menyampaikan pesan edukatif, menjaga etika publikasi, dan menyediakan akses informasi layanan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan Kuner et al (Kuner et al., 2017) bahwa tata kelola data dan privasi menjadi aspek penting dalam pemanfaatan teknologi digital, terutama ketika informasi yang dikelola berkaitan dengan kelompok rentan. Dalam isu perlindungan anak dan perempuan, pengelolaan konten digital juga harus memperhatikan prinsip keamanan, kerahasiaan identitas, dan pencegahan eksploitasi korban.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui pengembangan website edukasi dan advokasi berbasis komunitas. Intervensi yang dilakukan meliputi identifikasi kebutuhan mitra, pengumpulan data kelembagaan, perancangan struktur konten, pengembangan website, validasi bersama mitra, dan pendampingan pengelolaan konten. Pendekatan pendampingan partisipatif digunakan karena kegiatan pengabdian tidak hanya berorientasi pada produk teknologi, tetapi juga pada keterlibatan mitra dalam merancang, memvalidasi, dan mengelola media digital yang dikembangkan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip action research yang menempatkan mitra sebagai subjek aktif dalam proses perubahan dan pemecahan masalah (Stringer & Aragón, 2021a).

Tujuan umum kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan kapasitas digital Lembaga Burangir melalui pengembangan website edukasi dan advokasi berbasis komunitas. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk: 1) menyediakan satu media digital resmi yang aktif dan representatif bagi Lembaga Burangir; 2) menyusun struktur website yang memuat sebelas komponen informasi utama sesuai kebutuhan mitra; 3) menyediakan kanal edukasi dan advokasi mengenai perlindungan anak dan perempuan; 4) menyediakan akses awal informasi layanan melalui halaman kontak dan FAQ; serta 5) meningkatkan kemampuan mitra dalam memahami pengelolaan konten digital yang aman, etis, dan berkelanjutan.

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya media digital terpadu yang dapat memperkuat visibilitas Lembaga Burangir, memperluas penyebaran informasi perlindungan anak dan perempuan, mendukung dokumentasi kegiatan, membuka ruang partisipasi relawan dan donatur, serta memudahkan masyarakat memperoleh informasi awal mengenai layanan lembaga. Bagi masyarakat luas,

website ini diharapkan menjadi sumber informasi edukatif yang dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan anak dan perempuan di lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas. Kebaruan kegiatan ini terletak pada pengembangan website yang tidak hanya berfungsi sebagai profil organisasi, tetapi juga sebagai media edukasi, advokasi, dokumentasi, rekrutmen relawan, dukungan donasi, dan akses awal informasi layanan perlindungan anak dan perempuan berbasis komunitas.

2. METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif berbasis *action research*. Pendekatan ini dipilih karena kegiatan tidak hanya berorientasi pada pembuatan produk teknologi berupa website, tetapi juga menekankan keterlibatan aktif mitra dalam mengidentifikasi kebutuhan, menyusun konten, memvalidasi hasil, dan mengelola media digital secara berkelanjutan. *Action research* sesuai digunakan dalam kegiatan pengabdian karena menempatkan mitra sebagai subjek yang terlibat dalam proses perubahan, bukan hanya sebagai penerima manfaat (Stringer & Aragón, 2021b). Pendekatan partisipatif juga relevan dalam penguatan organisasi sosial karena mampu membangun rasa memiliki, meningkatkan keberlanjutan program, dan memastikan solusi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan komunitas sasaran.

Subjek kegiatan pengabdian ini adalah Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan Burangir yang berlokasi di Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara. Mitra merupakan organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam isu perlindungan anak dan perempuan melalui kegiatan edukasi, advokasi, pendampingan, publikasi, dan penguatan komunitas. Keterlibatan mitra dilakukan sejak tahap awal melalui diskusi kebutuhan, penyediaan dokumen kelembagaan, validasi struktur konten, pemberian masukan terhadap tampilan website, serta pendampingan pengelolaan konten. Keterlibatan ini penting karena transformasi digital pada organisasi nirlaba tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga berkaitan dengan perubahan proses komunikasi, tata kelola informasi, dan strategi hubungan dengan masyarakat (Cipriano & Za, 2025).

Tahapan kegiatan pengabdian dilakukan melalui enam tahap utama, yaitu identifikasi kebutuhan mitra, pengumpulan data kelembagaan, perancangan struktur website, pengembangan website, validasi bersama mitra, dan pendampingan pengelolaan konten.



Gambar 1. Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat

Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan mitra. Pada tahap ini dilakukan observasi awal dan diskusi dengan pengurus Lembaga Burangir untuk mengetahui

kondisi objektif mitra, permasalahan komunikasi digital, kebutuhan publikasi, serta jenis informasi yang perlu ditampilkan pada website. Identifikasi kebutuhan ini dilakukan untuk memastikan bahwa website yang dikembangkan tidak hanya berfungsi sebagai media profil, tetapi juga mendukung edukasi, advokasi, dokumentasi kegiatan, relawan, donasi, dan akses awal informasi layanan.

Tahap kedua adalah pengumpulan data kelembagaan. Data yang dikumpulkan meliputi dokumen legalitas lembaga, struktur organisasi, visi, misi, prinsip, nilai lembaga, program, dokumentasi kegiatan, alamat, kontak, dan materi publikasi. Data tersebut menjadi dasar penyusunan konten website agar informasi yang ditampilkan sesuai dengan identitas dan mandat sosial Lembaga Burangir. Dalam pengembangan media digital organisasi sosial, keakuratan dan kesesuaian informasi kelembagaan menjadi penting karena website dapat berfungsi sebagai pusat informasi resmi dan media pembangun kepercayaan publik (Moreno-Cabanillas et al., 2024) (Waters et al., 2009).

Tahap ketiga adalah perancangan struktur website. Pada tahap ini disusun struktur menu dan arsitektur informasi website berdasarkan kebutuhan mitra. Menu yang dirancang meliputi Beranda, Tentang Kami, Program, Aktivitas, Tim, Galeri, FAQ, Relawan, Kontak, dan Donasi. Struktur ini dirancang agar informasi lembaga dapat disajikan secara sistematis, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perancangan struktur konten juga mempertimbangkan fungsi website organisasi nirlaba sebagai media informasi, komunitas, dan ajakan tindakan sosial (Lovejoy & Saxton, 2012) (Nah & Saxton, 2013).

Tahap keempat adalah pengembangan website. Pengembangan dilakukan dengan membuat desain antarmuka, menata konten, mengunggah gambar, menyusun halaman program, membuat bagian berita dan edukasi, menyediakan informasi kontak, serta menambahkan kanal relawan dan donasi. Website dikembangkan dengan pendekatan desain yang sederhana, humanis, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Pada tahap ini, aspek etika publikasi juga diperhatikan karena mitra bergerak dalam isu perlindungan anak dan perempuan. Konten website diarahkan untuk tidak membuka identitas korban, tidak mengeksploitasi visual anak atau penyintas, serta menekankan edukasi, pencegahan, dan akses informasi layanan yang aman. Prinsip perlindungan data dan privasi perlu diperhatikan dalam pengelolaan media digital, khususnya ketika informasi berkaitan dengan kelompok rentan (Kuner et al., 2017) (Indonesia, 2023).

Tahap kelima adalah validasi dan revisi bersama mitra. Validasi dilakukan dengan meminta mitra meninjau tampilan, menu, narasi, gambar, kontak, serta kesesuaian konten dengan visi dan nilai lembaga. Masukan dari mitra digunakan untuk memperbaiki konten dan tampilan website agar lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi. Validasi bersama mitra penting dilakukan untuk memastikan bahwa solusi digital yang dikembangkan tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga relevan secara sosial dan kelembagaan.

Tahap keenam adalah pendampingan pengelolaan konten. Pada tahap ini mitra diberikan arahan mengenai pengelolaan konten website, seperti memperbarui informasi, menambahkan berita kegiatan, mengelola galeri, memperbarui kontak, serta menjaga etika publikasi. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mitra agar mampu mengelola website secara mandiri dan berkelanjutan.

Penguatan kapasitas digital organisasi sosial perlu diarahkan pada kemampuan mengelola informasi dan membangun komunikasi yang konsisten dengan publik (Guo & Saxton, 2018)(Mergel et al., 2019).

2.1. Teknik Pengumpulan Data

Data kegiatan pengabdian diperoleh melalui observasi kebutuhan mitra, diskusi dengan pengurus lembaga, telaah dokumen kelembagaan, analisis kebutuhan konten website, dokumentasi kegiatan, dan validasi hasil pengembangan. Data kualitatif diperoleh dari hasil diskusi, catatan kebutuhan mitra, serta masukan saat validasi website. Data luaran diperoleh dari jumlah halaman dan fitur website yang berhasil dikembangkan, ketersediaan media digital resmi, serta kesiapan mitra dalam mengelola konten website.

2.2. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan kegiatan disusun berdasarkan aspek ketersediaan media digital, kelengkapan konten, aksesibilitas informasi, keterlibatan mitra, dan keberlanjutan pengelolaan. Indikator ini digunakan agar hasil kegiatan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi memiliki ukuran keberhasilan yang dapat diamati.

Tabel 1. Indikator keberhasilan kegiatan

Aspek Evaluasi	Indikator Keberhasilan	Target Capaian
Ketersediaan media digital	Website lembaga tersedia dan dapat diakses publik	1 website aktif
Kelengkapan fitur	Website memuat komponen informasi utama lembaga	11 fitur utama tersedia
Struktur informasi	Informasi profil, program, kegiatan, edukasi, relawan, donasi, dan kontak tersusun terpadu	Tersusun dalam satu website
Kesesuaian konten	Konten sesuai visi, misi, prinsip, dan nilai Lembaga Burangir	Divalidasi oleh mitra
Edukasi dan advokasi	Tersedia konten edukasi perlindungan anak dan perempuan	Tersedia halaman berita/edukasi
Akses layanan awal	Tersedia informasi kontak dan FAQ layanan	Tersedia halaman kontak dan FAQ
Kapasitas mitra	Mitra memahami dasar pengelolaan konten website	Meningkat secara kualitatif
Keberlanjutan	Tersedia pengelola/admin dari pihak mitra	Minimal 1 pengelola/admin

Berdasarkan indikator tersebut, keberhasilan kegiatan diukur melalui tersedianya satu website aktif dan representatif, tersedianya sebelas fitur utama, tersusunnya informasi kelembagaan secara terpadu, adanya validasi konten oleh mitra, serta adanya penguatan kapasitas mitra dalam pengelolaan konten digital. Dengan indikator ini, hasil pengabdian dapat menunjukkan perubahan dari kondisi awal yang belum terintegrasi menjadi kondisi akhir yang lebih terstruktur, informatif, dan mudah diakses oleh masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menghasilkan penguatan kapasitas digital Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan Burangir melalui pengembangan website edukasi dan advokasi berbasis komunitas. Hasil kegiatan tidak hanya berupa produk digital, tetapi juga mencakup proses pendampingan, validasi kebutuhan mitra, penataan struktur informasi, penyusunan konten, serta penguatan kemampuan mitra dalam memahami pengelolaan media digital. Pembahasan hasil disusun dalam beberapa subbagian, yaitu profil dan kebutuhan digital mitra, proses pelaksanaan kegiatan, hasil pengembangan website, evaluasi capaian kegiatan, penguatan kapasitas mitra, serta pembahasan keberlanjutan program.

3.1. Profil dan Kebutuhan Digital Mitra

Lembaga Burangir merupakan organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang perlindungan anak dan perempuan. Lembaga ini memiliki mandat sosial dalam edukasi, advokasi, pendampingan, publikasi, serta penguatan komunitas. Berdasarkan hasil identifikasi awal, mitra telah memiliki dasar legalitas, struktur organisasi, visi, misi, prinsip kelembagaan, serta aktivitas sosial yang relevan dengan isu perlindungan anak dan perempuan. Namun, informasi kelembagaan tersebut belum tersaji secara terpadu dalam satu media digital resmi yang mudah diakses publik.

Permasalahan utama mitra adalah belum optimalnya media digital lembaga sebagai pusat informasi, edukasi, advokasi, dan akses layanan awal. Sebelum kegiatan pengabdian dilakukan, informasi terkait profil lembaga, program, kegiatan, dokumentasi, kanal relawan, donasi, FAQ, dan kontak layanan belum tersusun secara sistematis. Kondisi ini menyebabkan masyarakat belum memperoleh akses informasi yang lengkap mengenai layanan dan program Lembaga Burangir. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya intervensi berbasis teknologi informasi yang tidak hanya menyediakan website, tetapi juga menyusun struktur konten yang sesuai dengan kebutuhan mitra.

Kebutuhan mitra dapat diringkas dalam tiga aspek. Pertama, kebutuhan media informasi resmi untuk menampilkan identitas, profil, visi, misi, program, dan aktivitas lembaga. Kedua, kebutuhan media edukasi dan advokasi untuk menyebarkan informasi mengenai perlindungan anak, pendampingan perempuan, ruang aman, sekolah responsif gender, dan pencegahan kekerasan. Ketiga, kebutuhan kanal partisipasi publik untuk menampilkan informasi relawan, donasi, dan kontak layanan. Kebutuhan tersebut sejalan dengan peran website organisasi sosial sebagai media komunikasi digital yang dapat memperkuat transparansi, kredibilitas, partisipasi, dan hubungan dengan publik (Moreno-Cabanillas et al., 2024) (Waters et al., 2009).

3.2. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui pendampingan partisipatif antara tim pengabdian dan mitra. Kegiatan ini mencakup koordinasi kebutuhan mitra, pengumpulan data kelembagaan, penyusunan struktur konten, pengembangan website, validasi hasil pengembangan, serta pendampingan pengelolaan konten website. Dokumentasi pada Gambar 2 menunjukkan tahapan setelah website selesai dikembangkan, yaitu proses sosialisasi, demonstrasi fitur,

dan pendampingan penggunaan website kepada mitra. Pada tahap ini, tim pengabdian memperkenalkan tampilan website, menjelaskan struktur menu, menunjukkan fitur utama, serta mendiskusikan cara pemanfaatan website sebagai media edukasi, advokasi, publikasi kegiatan, dan akses awal informasi layanan Lembaga Burangir.



Gambar 2. Dokumentasi koordinasi dan pendampingan bersama mitra

Keterangan: Dokumentasi menunjukkan kegiatan sosialisasi hasil pengembangan website Lembaga Burangir kepada mitra. Tim pengabdian mendemonstrasikan tampilan halaman utama, fitur program, informasi layanan, menu edukasi, kanal relawan, donasi, serta kontak lembaga sebagai bagian dari proses pendampingan pengelolaan media digital.

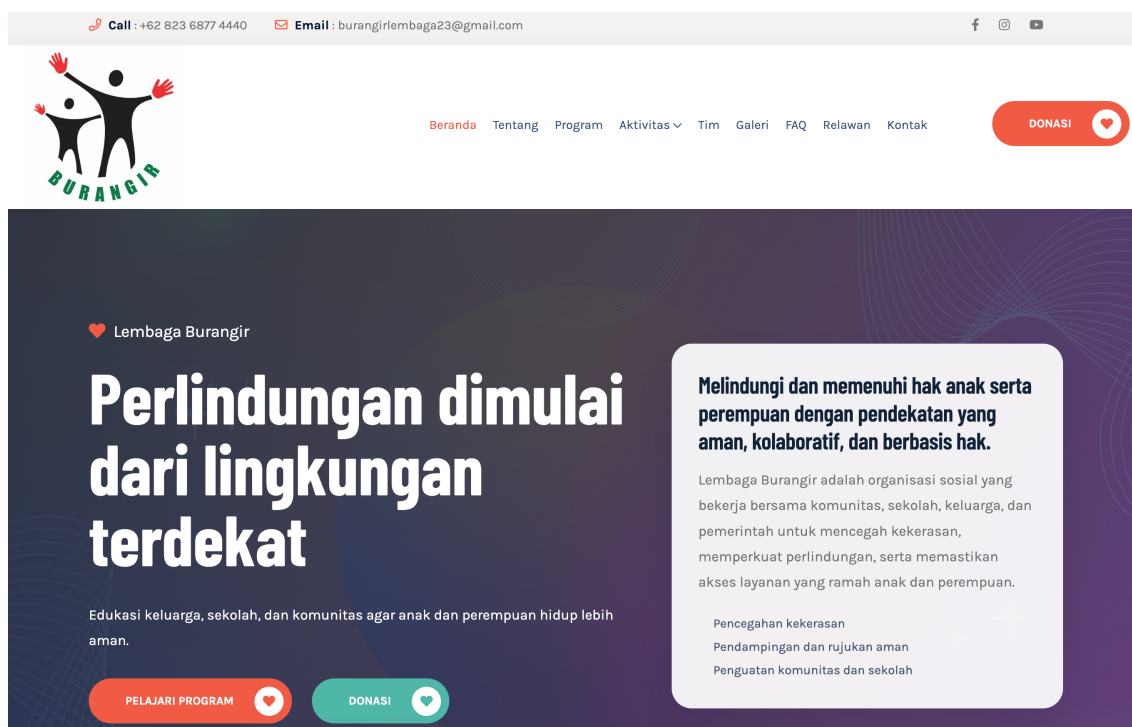
Pada tahap awal, mitra menyampaikan kebutuhan utama terkait penyediaan media digital resmi yang mampu menampilkan profil lembaga, program, kegiatan, edukasi, advokasi, relawan, donasi, dan kontak layanan secara terpadu. Tim pengabdian kemudian melakukan telaah terhadap dokumen legalitas, struktur organisasi, visi, misi, program, dan dokumentasi kegiatan. Data tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan struktur website agar konten yang ditampilkan sesuai dengan karakter, kebutuhan, dan mandat sosial Lembaga Burangir.

Pada tahap pengembangan, website dirancang dengan struktur menu yang mudah dipahami oleh masyarakat. Tampilan website menggunakan pendekatan visual yang bersih, humanis, dan informatif. Hal ini penting karena isu perlindungan anak dan perempuan membutuhkan komunikasi yang tidak menimbulkan ketakutan, tidak mengeksploitasi korban, tetapi tetap mampu menyampaikan pesan perlindungan, edukasi, dan advokasi secara jelas.

Setelah website selesai dikembangkan, dilakukan proses validasi dan pendampingan bersama mitra. Pada tahap ini, mitra meninjau kembali tampilan website, struktur menu, narasi konten, gambar, alamat, kontak, serta kesesuaian istilah yang digunakan. Tim pengabdian juga memberikan pendampingan mengenai cara membaca struktur informasi website, memahami fungsi setiap menu, serta mengelola konten agar website dapat digunakan secara berkelanjutan. Validasi ini menjadi bagian penting karena organisasi nirlaba membutuhkan media digital yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga merepresentasikan nilai, prinsip, dan mandat organisasi (Cipriano & Za, 2025) (Guo & Saxton, 2018).

3.3. Hasil Pengembangan Website

Hasil utama kegiatan pengabdian adalah tersedianya satu website Lembaga Burangir yang aktif dan representatif sebagai media edukasi dan advokasi. Website dikembangkan dengan sebelas fitur utama, yaitu Beranda, Tentang Kami, Program, Isu Prioritas, Agenda Kegiatan, Berita dan Edukasi, FAQ, Testimoni, Relawan, Donasi, dan Kontak. Fitur-fitur tersebut disusun untuk menjawab kebutuhan mitra dalam menyampaikan informasi secara terpadu kepada masyarakat.



Gambar 3. Tampilan halaman utama website Lembaga Burangir

Keterangan: Gambar menampilkan halaman utama website yang memuat identitas lembaga, pesan utama perlindungan anak dan perempuan, tombol aksi untuk mempelajari program, serta akses dukungan melalui donasi.

Pada halaman beranda, website menampilkan pesan utama “Perlindungan dimulai dari lingkungan terdekat”. Pesan ini menekankan bahwa perlindungan anak dan perempuan bukan hanya tanggung jawab lembaga, tetapi juga keluarga, sekolah, komunitas, dan masyarakat. Halaman beranda juga dilengkapi tombol aksi seperti “Pelajari Program” dan “Donasi” untuk memudahkan pengunjung mengakses informasi lanjutan.

Pada bagian program, website menampilkan layanan utama seperti Ruang Aman Anak, Pendampingan Perempuan, dan Sekolah Responsif Gender. Informasi ini disusun secara ringkas agar pengunjung dapat memahami ruang kerja lembaga dengan cepat. Pada bagian isu prioritas, website menampilkan isu yang berkaitan dengan perlindungan anak, rujukan aman bagi penyintas kekerasan berbasis gender, dan penguatan komunitas. Bagian ini memperkuat fungsi website sebagai media advokasi.

Pada bagian berita dan edukasi, website memuat artikel atau konten edukatif mengenai pentingnya SOP perlindungan anak di sekolah, ruang aman perempuan di tingkat komunitas, dan penguatan desa untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Konten edukatif ini memperlihatkan bahwa website tidak hanya berfungsi sebagai profil organisasi, tetapi juga sebagai sarana literasi publik.

Pada bagian FAQ, website menyediakan informasi awal mengenai layanan pendampingan, cara melaporkan kasus, keamanan identitas pelapor, dan cara menjadi relawan. Keberadaan FAQ penting karena masyarakat sering membutuhkan informasi dasar sebelum menghubungi lembaga. Namun, karena isu

anak dan perempuan bersifat sensitif, informasi pada bagian FAQ perlu tetap diarahkan sebagai akses informasi awal, bukan sebagai sistem pelaporan kasus penuh. Pengembangan kanal digital untuk isu anak dan perempuan perlu memperhatikan aspek keamanan data, privasi, dan perlindungan kelompok rentan (Kuner et al., 2017) (UNICEF Indonesia, 2023).

Tabel 2. Hasil pengembangan fitur website

Fitur Website	Fungsi	Manfaat bagi Mitra
Beranda	Menampilkan pesan utama dan identitas lembaga	Memperkuat kesan awal dan visibilitas lembaga
Tentang Kami	Menjelaskan profil, pendekatan, dan komitmen lembaga	Meningkatkan kepercayaan publik
Program	Menampilkan layanan dan intervensi utama	Memudahkan masyarakat memahami ruang kerja lembaga
Isu Prioritas	Menampilkan isu anak, perempuan, dan komunitas	Menguatkan fungsi advokasi
Agenda Kegiatan	Menampilkan agenda dan aktivitas terbaru	Mendokumentasikan kegiatan lembaga
Berita dan Edukasi	Menyajikan artikel edukatif dan advokasi	Menjadi media literasi publik
FAQ	Menjawab pertanyaan umum masyarakat	Memudahkan akses informasi awal
Testimoni	Menampilkan suara mitra dan penerima manfaat	Membangun kredibilitas lembaga
Relawan	Menyediakan kanal partisipasi publik	Mendukung penguatan jejaring
Donasi	Menyediakan akses dukungan publik	Mendukung keberlanjutan program
Kontak	Menampilkan alamat, email, dan nomor kontak	Memudahkan komunikasi dengan masyarakat

Berdasarkan Tabel 2, seluruh fitur yang dirancang telah diarahkan untuk mendukung kebutuhan komunikasi digital mitra. Website tidak hanya memuat informasi profil, tetapi juga memfasilitasi edukasi, advokasi, dokumentasi, relawan, donasi, dan kontak layanan. Hal ini sesuai dengan pandangan Lovejoy dan Saxton bahwa media digital organisasi nirlaba dapat menjalankan fungsi informasi, komunitas, dan tindakan sosial (Lovejoy & Saxton, 2012).

3.4. Evaluasi Capaian Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah intervensi. Sebelum kegiatan dilakukan, informasi Lembaga Burangir belum tersaji dalam satu media digital resmi yang terpadu. Setelah kegiatan pengabdian, tersedia satu website aktif yang memuat sebelas fitur utama. Perubahan ini menunjukkan

adanya peningkatan kapasitas digital mitra, terutama dalam aspek ketersediaan media, struktur informasi, edukasi publik, akses layanan awal, serta kanal partisipasi masyarakat.

Tabel 3. Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan

Aspek Evaluasi	Sebelum Kegiatan	Sesudah Kegiatan	Capaian
Media digital resmi	Belum tersedia secara terpadu	Website aktif tersedia	1 website aktif
Struktur informasi	Informasi tersebar dan belum sistematis	Informasi tersusun dalam menu website	11 fitur utama
Profil lembaga	Belum tersaji lengkap dalam satu kanal	Profil, visi, misi, dan komitmen lembaga tersedia	Tersedia
Informasi program	Belum tersusun sebagai halaman layanan	Program utama tersaji pada website	Tersedia
Edukasi publik	Belum tersedia sebagai kanal khusus	Tersedia berita dan edukasi	Tersedia
Akses layanan awal	Masih bergantung pada komunikasi langsung	Tersedia kontak dan FAQ	Tersedia
Relawan dan donasi	Belum ditampilkan sebagai kanal khusus	Tersedia kanal relawan dan donasi	Tersedia
Kapasitas pengelolaan	Mitra belum memiliki struktur konten digital terpadu	Mitra memperoleh pendampingan pengelolaan konten	Meningkat secara kualitatif

Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil kegiatan dapat diukur melalui beberapa indikator capaian. Pertama, tersedia satu website aktif sebagai media resmi lembaga. Kedua, tersedia sebelas fitur utama yang mencakup kebutuhan informasi, edukasi, advokasi, relawan, donasi, dan kontak. Ketiga, informasi lembaga yang sebelumnya belum terintegrasi telah tersusun dalam satu kanal digital. Keempat, mitra memperoleh pendampingan dalam memahami pengelolaan konten website. Peningkatan kapasitas digital mitra dalam kegiatan ini dinilai secara kualitatif. Sebelum kegiatan, mitra belum memiliki media digital yang terstruktur sebagai pusat informasi resmi. Setelah kegiatan, mitra memiliki website dengan struktur informasi yang lebih lengkap, representatif, dan mudah diakses. Perubahan ini menunjukkan peningkatan dari kondisi belum terintegrasi menjadi lebih terstruktur, informatif, dan komunikatif. Penguatan kapasitas seperti ini penting karena transformasi digital pada organisasi sosial tidak hanya diukur dari tersedianya teknologi, tetapi juga dari kemampuan organisasi mengelola informasi dan membangun relasi dengan masyarakat (Mergel et al., 2019) (Verhoef et al., 2021).

3.5. Penguatan Kapasitas Digital Mitra

Pengembangan website memberikan kontribusi terhadap penguatan kapasitas digital Lembaga Burangir dalam lima aspek utama. Pertama, website memperkuat identitas digital lembaga. Dengan adanya website, Lembaga Burangir memiliki media resmi yang dapat menjadi rujukan publik untuk memperoleh informasi mengenai profil, program, aktivitas, dan kontak lembaga. Identitas digital yang jelas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi sosial, terutama lembaga yang bekerja pada isu sensitif seperti perlindungan anak dan perempuan (Waters et al., 2009).

Kedua, website meningkatkan kapasitas edukasi publik. Konten berita dan edukasi pada website dapat digunakan untuk menyampaikan pesan pencegahan kekerasan, pentingnya ruang aman, perlindungan anak di lingkungan sekolah, serta pendampingan perempuan di tingkat komunitas. Dengan demikian, website dapat menjadi sarana literasi sosial yang mendukung peningkatan kesadaran masyarakat. Ketiga, website mendukung fungsi advokasi lembaga. Halaman isu prioritas, program, dan berita memungkinkan lembaga menyampaikan pesan advokasi secara lebih luas. Strategi komunikasi digital yang baik dapat membantu organisasi sosial memperoleh perhatian publik dan memperkuat dukungan terhadap isu yang diperjuangkan (Guo & Saxton, 2018).

Keempat, website memperluas akses awal informasi layanan. Melalui halaman kontak dan FAQ, masyarakat dapat mengetahui informasi dasar mengenai layanan, cara menghubungi lembaga, serta pertanyaan umum terkait keamanan identitas pelapor. Akses informasi awal ini penting karena masyarakat sering kali membutuhkan petunjuk awal sebelum memutuskan untuk meminta bantuan atau pendampingan.

Kelima, website membuka ruang partisipasi masyarakat melalui kanal relawan dan donasi. Fitur ini mendukung keberlanjutan lembaga karena organisasi sosial lokal sering menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan. Media digital dapat membantu organisasi membangun reputasi, kepercayaan, dan partisipasi publik dalam kegiatan sosial (Obadã, 2024).

3.6. Etika Publikasi dan Perlindungan Data

Pengembangan website untuk lembaga perlindungan anak dan perempuan perlu memperhatikan aspek etika publikasi. Isu kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan isu sensitif yang tidak boleh dipublikasikan secara sembarangan. Informasi yang berkaitan dengan anak, korban, penyintas, lokasi kasus, dan kronologi kekerasan perlu dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan risiko baru bagi korban.

Dalam kegiatan ini, prinsip yang ditekankan adalah tidak menampilkan identitas korban, tidak mengeksploitasi wajah anak atau penyintas, tidak membuka lokasi detail yang dapat mengarah pada korban, tidak menggunakan narasi yang menyalahkan korban, dan tidak menjadikan penderitaan korban sebagai bahan promosi. Konten website diarahkan pada edukasi, pencegahan, dukungan, dan rujukan aman.

Perhatian terhadap privasi dan perlindungan data menjadi penting karena pengelolaan informasi digital berkaitan langsung dengan keamanan pengguna. Kuner menegaskan bahwa tata kelola data dan privasi merupakan aspek penting

dalam pemanfaatan teknologi digital (Kuner et al., 2017). Dalam konteks perlindungan anak, UNICEF Indonesia juga menekankan bahwa anak-anak menghadapi risiko digital yang perlu diantisipasi melalui literasi, pengawasan, dan penggunaan teknologi secara aman (UNICEF Indonesia, 2023).

Oleh karena itu, pengembangan website perlu diikuti dengan penyusunan SOP pengelolaan konten. SOP tersebut dapat mencakup alur pembuatan konten, verifikasi informasi, persetujuan publikasi, perlindungan identitas korban, penggunaan foto kegiatan, pengelolaan pesan masuk, dan pembaruan informasi kontak. Dengan adanya SOP, keberlanjutan website tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada tata kelola informasi yang aman dan bertanggung jawab.

3.7. Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengembangan website dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat kapasitas digital organisasi sosial lokal. Website yang dikembangkan mampu menjawab permasalahan mitra, yaitu belum tersedianya media digital resmi yang menyajikan informasi secara terpadu. Melalui website, informasi kelembagaan, program, kegiatan, edukasi, relawan, donasi, dan kontak dapat diakses dalam satu kanal.

Temuan ini sejalan dengan konsep transformasi digital yang menempatkan teknologi sebagai bagian dari perubahan strategi organisasi, bukan sekadar alat teknis (Vial, 2019). Dalam konteks Lembaga Burangir, website tidak hanya menjadi produk teknologi, tetapi juga menjadi media penguatan kelembagaan. Website mendukung fungsi edukasi, advokasi, dokumentasi, komunikasi publik, serta akses awal informasi layanan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi nyata bagi mitra dalam membangun sistem komunikasi digital yang lebih terstruktur.

Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa pengabdian berbasis teknologi informasi dapat menghasilkan dampak sosial ketika dirancang sesuai kebutuhan mitra. Pendekatan partisipatif membuat mitra terlibat dalam penentuan struktur konten dan validasi informasi. Hal ini penting karena organisasi sosial memiliki nilai, prinsip, dan karakter komunikasi yang berbeda dari organisasi bisnis. Website untuk lembaga perlindungan anak dan perempuan harus disusun dengan pendekatan yang sensitif, aman, edukatif, dan tidak mengeksploitasi korban.

Kebaruan kegiatan ini terletak pada integrasi fungsi profil, edukasi, advokasi, dokumentasi, relawan, donasi, dan akses awal informasi layanan dalam satu website lembaga perlindungan anak dan perempuan berbasis komunitas. Website tidak hanya menjadi media profil lembaga, tetapi juga mendukung literasi publik, partisipasi masyarakat, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, pengembangan website ini dapat menjadi model pengabdian berbasis digital bagi organisasi sosial lokal yang bergerak dalam isu perlindungan kelompok rentan.

Meskipun demikian, kegiatan ini masih memiliki keterbatasan. Evaluasi capaian baru dilakukan pada aspek ketersediaan website, kelengkapan fitur, validasi konten, dan peningkatan kapasitas secara kualitatif. Ke depan, evaluasi perlu dilengkapi dengan data kuantitatif, seperti jumlah pengunjung website, jumlah artikel yang dipublikasikan, jumlah pesan masuk, jumlah pendaftar relawan, tingkat kepuasan pengguna, dan kemampuan admin dalam memperbarui konten. Dengan indikator

tersebut, dampak website terhadap akses informasi dan kapasitas digital mitra dapat diukur secara lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil mengembangkan website Lembaga Burangir sebagai media edukasi, advokasi, publikasi, relawan, donasi, dan akses informasi layanan berbasis komunitas. Website yang dikembangkan memuat halaman beranda, profil lembaga, program layanan, isu prioritas, agenda kegiatan, berita edukasi dan advokasi, FAQ, testimoni, mitra, relawan, donasi, serta kontak lembaga. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa website dapat memperkuat kapasitas digital mitra melalui peningkatan visibilitas lembaga, penyediaan informasi yang lebih terpadu, penguatan edukasi publik, dan perluasan akses awal masyarakat terhadap informasi perlindungan anak dan perempuan.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pengembangan website bagi organisasi sosial lokal perlu memperhatikan aspek etika publikasi, perlindungan data, dan keamanan informasi, khususnya karena mitra bergerak pada isu anak dan perempuan. Oleh karena itu, keberlanjutan program perlu diarahkan pada pelatihan admin, penyusunan SOP konten, evaluasi pemanfaatan website, serta pengembangan fitur lanjutan yang tetap memperhatikan privasi dan keselamatan penerima manfaat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan Burangir yang telah bersedia menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pengurus, relawan, dan pihak yang telah mendukung proses pengumpulan data, validasi konten, serta pengembangan website sebagai media edukasi dan advokasi perlindungan anak dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cipriano, M., & Za, S. (2025). Exploring the discourse on digital transformation in nonprofit organizations: A bibliometric analysis. *Information & Management*, 62(6), 104165. <https://doi.org/10.1016/j.im.2025.104165>
- Guo, C., & Saxton, G. D. (2018). Speaking and being heard: How nonprofit advocacy organizations gain attention on social media. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 47(1), 5–26. <https://doi.org/10.1177/0899764017713724>
- Indonesia, U. (2023). *Online knowledge and practice of parents and children in Indonesia: A baseline study 2023*. UNICEF Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/reports/online-knowledge-and-practice-parents-and-children-indonesia>

- Innocenti, U. (2025). *Childhood in a digital world: Screen time, digital skills and mental health*. UNICEF Innocenti. <https://www.unicef.org/innocenti/reports/childhood-digital-world>
- Kuner, C., Svantesson, D. J. B., Cate, F. H., Lynskey, O., Millard, C., & Loideain, N. N. (2017). The GDPR as a chance to break down borders. *International Data Privacy Law*, 7(4), 231–232. <https://doi.org/10.1093/idpl/ipx023>
- Lovejoy, K., & Saxton, G. D. (2012). Information, community, and action: How nonprofit organizations use social media. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 17(3), 337–353. <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2012.01576.x>
- Mergel, I., Edelman, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Moreno-Cabanillas, A., Castellero-Ostio, E., & Castillo-Esparcia, A. (2024). Digital communication and social organizations: An evaluation of the communication strategies of the most-valued NGOs worldwide. *Future Internet*, 16(1), 26. <https://doi.org/10.3390/fi16010026>
- Nah, S., & Saxton, G. D. (2013). Modeling the adoption and use of social media by nonprofit organizations. *New Media & Society*, 15(2), 294–313. <https://doi.org/10.1177/1461444812452411>
- Obadă, D. R. (2024). Predictors of social media users' intention to donate online towards international NGOs in the fake news era. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11, 530. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-02900-1>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Stringer, E. T., & Aragón, A. O. (2021a). *Action research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Stringer, E. T., & Aragón, A. O. (2021b). *Action research* (5th ed.). SAGE Publications.

- UNICEF Indonesia. (2023). *Online knowledge and practice of parents and children in Indonesia: A baseline study 2023*.
<https://www.unicef.org/indonesia/reports/online-knowledge-and-practice-parents-and-children-indonesia>
- United Nations. (2024). *Child and youth safety online*. <https://www.un.org/>
- Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889–901.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022>
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144.
<https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>
- Waters, R. D., Burnett, E., Lamm, A., & Lucas, J. (2009). Engaging stakeholders through social networking: How nonprofit organizations are using Facebook. *Public Relations Review*, 35(2), 102–106.
<https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2009.01.006>